

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. PT RajaGrafindo Persada. Depok. hlm. 27.
- Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 13.
- Achmad Ali. 2007. *Menguak Teori Hukum Legal theory dan Teori Peradilan Judicialprudance*.Kencana. Makassar. hlm. 48.
- Amran Suadi. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Rajawali Pers. Depok. hlm. 16.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chayaningsi. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Pustaka YustisiaYogyakarta. hlm.2.
- A.P. Parlindungan. 1997. *Komentar atas Undang-Undang Perumahan dan Permukiman & Undang-Undang Rumah Susun*. CV. Mandar Maju. Bandung. hlm. 30.
- Eko Budiharjo. 1998. *Sejumlah masalah permukiman kota*. Alumni. Bandung.
- Hadi Sabari Yunus, 1987, *Subject Master dan Metode Penelitian Geografi Permukiman Kota*, Geography Faculty of Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Komarudin. 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Rakasindo. Jakarta. hlm. 46.
- Lukman Santoso Az. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm. 74.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Group. hlm. 133.

- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung. PT Kharisma Putra Utama. hlm. 133.
- Suharizal dan Muslim chaniago. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Thafa Media. Yogyakarta. hlm. 52.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia Press. hlm. 51.
- Satjipto Rahrdjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 45.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mnenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. hlm. 34.
- Ubedilah. 2000. *Demokrasi, HAM,dan Masyarakat Madani*. Indonesia Center for Civic Education. Jakarta. hlm.170
- Urip Santoso. 2014. *Hukum Perumahan*. Prenamedia Group. Jakarta. hlm. 10-12.
- Yusnani Hasyimzoem. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 17-18.

Jurnal:

- Alhamidy. Fauzan Aziman dan Zainal Muttaqin. "Perlindungan Hukum Konsumen Akibat Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Apartemen (Studi Kasus di Kota Bandung)." *Jurnal Recital Review*. Volume 2 Nomor 1. (2020): 90-99.

Internet :

- <https://luwurayanews.com/2021/02/program-bedah-rumah-pemerintah-di-kelurahan-tomoni-kab-luwu-timur-di-duga-abaikan-rumah-warga-yang-tak-layak-huni-lagi/>
Diakses pada tanggal 27 Juni 2021

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan